



KECAMATAN KESAMBEN

**DOKUMEN
RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
KECAMATAN KESAMBEN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Kesamben Tahun 2026. Renja Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029

Renja Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kesamben, 14 Agustus 2025



HERI WIDYATMOKO, S.Pt.

Pembina Tingkat 1

NIP: 19720115 199803 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra pd	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah.....	26
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	32
2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	55
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	56
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
Bab V. PENUTUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sd Tahun 2024	21
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	28
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	39
Tabel 3.3.1	Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 Dan prakiraan Maju Maju Tahun 2027	60
Tabel 4.1.1	Program Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Kesamben secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Kesamben membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi: (a)
Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim

penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Kesamben Tahun 2026 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Kesamben yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Kesamben 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82).
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan renja PD adalah :

1. Tercapainya Keselarasan Dokumen Renja PD dengan RKPD 2026 Dan RPJMD
2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi antar dokumen perencanaan lainnya
3. Tercapainya Indikator Sasaran Renstra Pada Tahun 2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kesamben Tahun 2026 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggppenganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/Internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, pokok pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD sesuai dengan Visi Misi Rancangan RPJMD tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Penanganan Stunting, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikatornya Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 90% tercapai 100%

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan target kinerja 100%

Sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah indikatornya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 49,01% atau sebesar Rp. 7.410.000.- dari pagu anggaran Rp. 15.120.000,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan target 100%

Sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 94,92 % atau sebesar Rp. 1.335.215.620,00 dari pagu anggaran Rp. 1.406.665.100,00.

3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 100% atau sebesar Rp 6.054.000,- dari pagu anggaran Rp 6.054.000,-

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikatornya Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%. Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 92,28% atau sebesar Rp.101.510.000,- dari pagu anggaran Rp.110.000.000,-
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan target 100%. Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 92,32% atau sebesar Rp 110.012.790,- dari pagu anggaran Rp 119.161.725,-.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 98,43 % atau sebesar Rp. 70.250.000,- dari pagu anggaran Rp. 71.367.561,-;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 90,93 % atau sebesar Rp. 134.926.676,- dari pagu anggaran Rp. 148.382.714,-;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan target 100%. Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 98,76 % atau sebesar 141.120.588,45,- dari pagu anggaran Rp. 142.892.000,-;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator untuk program ini adalah Presentase desa dengan predikat IKM Baik
Kegiatan pada program ini adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100% sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 17.998.000,- dengan capaian realisasi 99,65 % atau Rp 17.935.500,-

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 %. sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 8.466.000,- dengan capaian realisasi 99,70 % atau sebesar Rp. 8.440.500,-

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan dengan target kinerja pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan triwulan IV tahun 2024. dengan pagu anggaran Rp 8.600.000,- dengan capaian realisasi 100% atau sebesar Rp 8.600.000,-.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 5 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. capaian kinerja 100 %. sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran adalah Rp. 15.788.000,00,- dengan capaian realisasi sampai triwulan IV adalah 99,70% atau sebesar Rp 15.740.000,00,-.

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator kegiatan adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan. capaian kinerja 100 %. sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran adalah Rp. 12.720.000,00,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99,90% atau sebesar Rp 12.707.000,00,-.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator program ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 2 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan program ini adalah :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 31.466.900,- dengan capaian realisasi 98,82% atau sebesar Rp 31.096.000,-..

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 17.848.350,- dengan capaian realisasi 99,95% atau sebesar Rp 17.840.000,-..

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator program ini adalah jumlah Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 3 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Kegiatannya: Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator program ini adalah jumlah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 3 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100 %. dengan. Pagu anggaran sebesar

Rp 21.735.250,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99.56 %. atau sebesar Rp 21.640.000,-.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator program ini adalah jumlah Peraturan Perundang-undangan Desa Yang dibuat dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 10 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator program adalah Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100 %. Pagu anggaran adalah Rp 51.088.000,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99,98% atau sebesar Rp 51.080.000,-.

Pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

indikatornya Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah indikatornya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu Rp 3.918.000,00 terealisasi Rp. 0,00.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

indikatornya persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan target 100%.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 1.383.934.066,00 telah terealisasi sebesar Rp 874.708.715,00,-, atau sebesar 63,20%;

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 39.060.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 13.020.000,00. atau sebesar 33,33%;

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp 4.080.000,00 belum terealisasi.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp 1.530.000,00 belum terealisasi.

3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

Indikator persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik dengan target 100%.

Pada kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dari pagu anggaran sebesar Rp 2.850.000,- belum terealisasi.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp.35.000.000,- belum terealisasi.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Persentase pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel dengan target 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 4.112.500,00 telah terealisasi sebesar Rp 4.030.000,-, atau sebesar 97,99%;

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp 3565600,00 telah terealisasi sebesar Rp 3.506.000,-, atau sebesar 98,33%;

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp 3.281.750,00 telah terealisasi sebesar Rp 1.882.000,-, atau sebesar 57,35%;

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp 7.840.000,- telah terealisasi sebesar Rp 3.920.000,00 atau sebesar 50%;

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 31.835.500,00 telah terealisasi sebesar Rp 11.395.000,00 atau sebesar 35,79%;

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp 3.850.000,00 Belum terealisasi.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran dengan target 100%

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu anggaran Rp. 14.738.900,00,- belum direalisasikan;

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu dengan target 100%.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari pagu anggaran Rp. 31.089.000,- telah di realisasikan sebesar Rp 7.807.337,- atau sebesar 25,11%;

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari pagu anggaran Rp. 26.114.500 telah di realisasikan sebesar Rp 24.720.000,- atau sebesar 94,66%;

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari pagu anggaran Rp. 84.652.368,- sudah di realisasikan sebesar Rp 34.069.514 atau sebesar 40,25%;

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai sasaran dengan target 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 67.200.000,00 terealisasi Rp 18.556.500,00 atau sebesar 27,61%;;

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.560.000,00 terealisasi Rp 1.800.000,00 atau sebesar 21,03%;;

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 158.670.000,00 belum terealisasi;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dengan indikator Presentase desa dengan predikat IKM Baik

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan dengan target 2 kali

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan pagu anggaran Rp 6.700.000,- belum terealisasi;

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 5.100.000,- belum terealisasi;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target 1 layanan.

Sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 6.600.000,- belum terealisasi;

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan target 12 Dokumen

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan pagu anggaran Rp 8.220.000,- belum terealisasi;

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dengan target 1 pemberdayaan.

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target 2 kali.

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu anggaran Rp 7.050.000,- telah di realisasikan sebesar Rp 7.050.000; atau sebesar 100%;

Sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 6.900.000,- belum terealisasi;

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator kegiatan adalah jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan target 100 keluarga.

Sub kegiatan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan pagu anggaran Rp 13.800.000,- telah di realisasikan sebesar Rp 5.700.000; atau sebesar 41,30%;

d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator program ini adalah Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target 2 kali.

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target 6 kali.

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 25.945.000,- belum direalisasikan;

Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran Rp 7.500.000,- belum direalisasikan;

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan dengan target 1 kali.

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pagu anggaran Rp 7.030.000,- belum direalisasikan;

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator program ini adalah Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target 3 kali.

Kegiatan program ini adalah:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Indikator program ini adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dengan target 3 kali.

Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pagu anggaran Rp 9.100.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan pagu anggaran Rp 6.800.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan pagu anggaran Rp 5.630.000,00 belum direalisasikan.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator program adalah Jumlah Peraturan Perundang-undangan Desa Yang dibuat dengan target 20 Peraturan perundang-undangan desa.

Kegiatan program ini adalah:

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator program adalah Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan target 10 Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan.

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan pagu anggaran Rp 8.300.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pagu anggaran Rp 6.100.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pagu anggaran Rp 6.750.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp 6.700.000,00 belum direalisasikan;;

Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp 4.500.000,00 belum direalisasikan;

Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan pagu anggaran Rp 9.550.000,00 belum direalisasikan;

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan secara keseluruhan persentase penyerapan anggaran Kecamatan Kesamben Tahun 2024 sebesar 95,38 % dan Penyerapan anggaran di tahun 2025 semester 1 (Januari sd Juni 2025) sebesar 49,13%. Ada 2 sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai anggar kas.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2025 semester 1 ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas.
2. Pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran

di tahun 2025 semester 1 ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas.

3. Pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :
 - a. Kurangnya ketersediaan SDM yang mengakibatkan *overload* pekerjaan masing-masing staf.
Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilhkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada.
 - b. Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan pada tahun berjalan ada kegiatan insidentil yang sebelumnya belum masuk pada perencanaan sehingga perlu adanya penyesuaian pada saat perubahan rencana anggaran.
 - c. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
 - d. Kurangnya Koordinasi yang baik antara ASN, yang berakibat kesalahpahaman diantara ASN.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben tahun 2021-2026 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben berdampak rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
 - c. Perlu adanya pengusulan penambahan personil pegawai di Kecamatan Kesamben kepada Dinas Pengampu.

Rincian evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sd Tahun 2024
Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Kecamatan Kesamben

Lembar : 1 dari 5

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit
			Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)							I	II	III	IV	13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	16	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah		10.016.405.084,00	- 100	7.342.666.000,00	100	2.005.988.700,00	100	354.775.223,00	100	529.677.015,00	100	371.427.142,00	100	650.620.294,00	100	1.906.499.674,00	100,00	95,04	100,00	9.249.165.674,00	100,00	100,00	9.249.165.674,00	Kecamatan Kesamben
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	- 40	56.868.312,00	- 24	12.356.000,00	- 8	15.120.000,00	- 2	0,00	- 2	7.410.000,00	- 2	0,00	- 2	0,00	- 8	7.410.000,00	- 80,00	49,01	- 32	19.766.000,00	- 80,00	34,76	19.766.000,00	Kecamatan Kesamben
3	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- 95	56.868.312,00	- 38	12.356.000,00	- 19	15.120.000,00		0,00	- 8	7.410.000,00		0,00		0,00	- 8	7.410.000,00	- 8,42	49,01	- 8	19.766.000,00	- 8,42	34,76	19.766.000,00	Kecamatan Kesamben
4	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabe	- 10	9.886.479.684,00	- 6	7.863.945.823,00	- 2	2.583.284.900,00		571.185.482,00		877.468.270,00		551.028.909,00	- 2	476.628.153,00	- 2	2.476.310.814,00	- 80,00	95,86	- 8	10.340.256.637,00	- 80,00	104,59	10.340.256.637,00	Kecamatan Kesamben
5	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	- 80	8.276.675.523,00	- 50	6.451.415.600,00	- 16	1.349.214.300,00	- 10	322.342.293,00	- 10	461.447.721,00	- 10	290.921.329,00	- 10	215.571.777,00	- 40	1.290.283.120,00	- 112,50	95,63	- 90	7.741.698.720,00	- 112,50	93,54	7.741.698.720,00	Kecamatan Kesamben
6	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 45	213.221.000,00	- 9,00	34.260.000,00	- 9	35.460.000,00	- 6	5.910.000,00	- 6	5.910.000,00	- 6	11.820.000,00	- 6	11.820.000,00	- 24	35.460.000,00	- 73,33	100,00	- 33	69.720.000,00	- 73,33	32,70	69.720.000,00	Kecamatan Kesamben
7	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- 105	6.454.875,00	- 7	1.820.000,00	- 21	9.120.000,00		0,00		0,00	- 2	4.500.000,00	- 8	4.535.000,00	- 10	9.035.000,00	- 16,19	99,07	- 17	10.855.000,00	- 16,19	168,17	10.855.000,00	Kecamatan Kesamben
8	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- 80	18.004.063,00	- 24	4.326.000,00	- 12	444.000,00		0,00		0,00		0,00	- 1	437.500,00	- 1	437.500,00	- 31,25	98,54	- 25	4.763.500,00	- 31,25	26,46	4.763.500,00	Kecamatan Kesamben
9	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		- 650	21.610.063,00	- 520	4.325.000,00	0130	6.054.000,00	- 25	0,00	- 25	0,00	- 30	6.054.000,00	- 50	0,00	- 130	6.054.000,00	100,00	100,00	- 650	10.379.000,00	- 100,00	48,03	10.379.000,00	Kecamatan Kesamben
10	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- 10	21.610.063,00	- 4	4.325.000,00	- 2	6.054.000,00		0,00		0,00	- 2	6.054.000,00		0,00	- 2	6.054.000,00	- 60,00	100,00	- 6	10.379.000,00	- 60,00	48,03	10.379.000,00	Kecamatan Kesamben
11	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- 5	91.435.110,00	- 3	40.000.000,00	- 1	110.000.000,00		0,00		0,00		0,00	- 1	101.510.000,00	- 1	101.510.000,00	- 80,00	92,28	- 4	141.510.000,00	- 80,00	154,77	141.510.000,00	Kecamatan Kesamben
12	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 80	91.435.110,00	- 10	40.000.000,00	- 13	110.000.000,00		0,00		0,00		0,00	- 13	101.510.000,00	- 13	101.510.000,00	- 28,75	92,28	- 23	141.510.000,00	- 28,75	154,77	141.510.000,00	Kecamatan Kesamben

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Output) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
13	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabe	- 100	234.399.866,00	- 100	176.449.428,00	- 100	119.161.725,00	- 100	11.250.000,00	- 100	15.200.000,00	- 100	18.992.000,00	- 100	64.570.790,00	- 100	110.012.790,00	- 100,00	92,32	- 100,00	- 100,00	286.462.218,00	- 100,00	122,21	286.462.218,00	Kecamatan Kesamben
14	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 30	7.858.441,00	- 5	2.943.600,00	- 6	3.574.755,00		0,00		0,00	- 6	3.432.000,00		0,00	- 6	3.432.000,00	- 36,67	96,01	- 11	6.375.600,00	- 36,67	81,13	6.375.600,00	Kecamatan Kesamben	
15	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- 10	15.609.438,00	- 4	3.090.000,00	- 2	5.443.218,00		0,00		0,00		0,00	- 1	5.234.900,00	- 1	5.234.900,00	- 50,00	96,17	- 5	8.324.900,00	- 50,00	53,33	8.324.900,00	Kecamatan Kesamben	
16	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- 20	17.728.957,00	- 8	3.116.000,00	- 4	5.675.652,00		0,00		0,00		0,00	- 4	5.593.500,00	- 4	5.593.500,00	- 60,00	98,55	- 12	8.709.500,00	- 60,00	49,13	8.709.500,00	Kecamatan Kesamben	
17	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	- 5	47.306.957,00	- 1,00	18.720.728,00	- 1	12.998.100,00		0,00		6.200.000,00		0,00	- 1	6.630.000,00	- 1	12.830.000,00	- 40,00	98,71	- 2	31.550.728,00	- 40,00	66,69	31.550.728,00	Kecamatan Kesamben	
18	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	- 60	135.848.457,00	- 24	144.066.600,00	- 12	88.270.000,00	- 3	11.250.000,00	- 3	9.000.000,00	- 3	15.560.000,00	- 3	43.912.390,00	- 12	79.722.390,00	- 60,00	90,32	- 36	223.788.990,00	- 60,00	164,73	223.788.990,00	Kecamatan Kesamben	
19	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	- 60	10.047.616,00	- 21	4.512.500,00	- 12	3.200.000,00		0,00		0,00		0,00	- 12	3.200.000,00	- 12	3.200.000,00	- 55,00	100,00	- 33	7.712.500,00	- 55,00	76,76	7.712.500,00	Kecamatan Kesamben	
20	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah jenis pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	- 17	269.958.318,00	- 11	88.109.200,00	- 4	71.367.561,00		0,00		0,00		0,00	- 4	70.250.000,00	- 4	70.250.000,00	- 88,24	98,43	- 15	158.359.200,00	- 88,24	58,66	158.359.200,00	Kecamatan Kesamben	
21	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- 10	151.625.000,00	- 2	23.440.000,00	- 2	43.383.795,00		0,00		0,00		0,00	- 2	43.220.000,00	- 2	43.220.000,00	- 40,00	99,62	- 4	66.660.000,00	- 40,00	43,96	66.660.000,00	Kecamatan Kesamben	
22	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- 10	118.333.318,00	- 1	64.669.200,00	- 2	27.983.766,00		0,00		0,00		0,00	- 2	27.030.000,00	- 2	27.030.000,00	- 30,00	96,59	- 3	91.699.200,00	- 30,00	77,49	91.699.200,00	Kecamatan Kesamben	
23	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	- 100	444.721.376,00	- 100	236.483.772,00	- 100	147.155.114,00	- 100	15.272.930,00	- 100	22.909.294,00	- 100	21.457.213,00	- 100	75.287.239,00	- 100	134.926.676,00	- 100,00	91,69	- 100	371.410.448,00	- 100,00	83,52	371.410.448,00	Kecamatan Kesamben	
24	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 60	101.997.429,00	- 3	41.007.600,00	- 12	22.337.000,00	- 3	2.804.930,00	- 3	4.207.294,00	- 3	2.755.213,00	- 3	6.425.139,00	- 12	16.192.576,00	- 25,00	72,49	- 15	57.200.176,00	- 25,00	56,08	57.200.176,00	Kecamatan Kesamben	
25	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	- 60	110.134.447,00	- 3	50.667.590,00	- 12	49.993.194,00		0,00		0,00		0,00	- 12	43.926.100,00	- 12	43.926.100,00	- 25,00	87,86	- 15	94.593.690,00	- 25,00	85,89	94.593.690,00	Kecamatan Kesamben	
26	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 60	232.589.500,00	- 3	144.808.582,00	- 12	74.824.920,00	- 3	12.468.000,00	- 3	18.702.000,00	- 3	18.702.000,00	- 3	24.936.000,00	- 12	74.808.000,00	- 25,00	99,98	- 15	219.616.582,00	- 25,00	94,42	219.616.582,00	Kecamatan Kesamben	
27	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah w aktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- 12	383.056.578,00	- 12	293.121.000,00	- 12	142.892.000,00		0,00		16.800.000,00		17.682.600,00	- 12	106.637.988,00	- 12	141.120.588,00	- 100,00	98,76	- 12,00	434.241.588,00	- 100,00	113,36	434.241.588,00	Kecamatan Kesamben	
28	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- 60	208.615.563,00	- 3	100.200.000,00	- 12	67.200.000,00		0,00	- 6	16.800.000,00	- 3	17.682.600,00	- 3	32.550.000,00	- 12	67.032.600,00	- 25,00	99,75	- 15	167.232.600,00	- 25,00	80,16	167.232.600,00	Kecamatan Kesamben	
29	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 30	17.096.640,00	- 6	8.126.000,00	- 6	10.970.000,00		0,00		0,00		0,00	- 6	9.955.000,00	- 6	9.955.000,00	- 40,00	90,75	- 12	18.081.000,00	- 40,00	105,76	18.081.000,00	Kecamatan Kesamben	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 1 Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12/7)*100%	14=6+12	15=(14/5)*100% Rp=14	16												
30	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- 5	157.344.375,00	- 1	184.795.000,00	- 1	64.722.000,00		0,00		0,00		0,00	- 1	64.132.988,00	- 1	64.132.988,00	- 40,00	99,09	- 2	248.927.988,00	- 40,00	158,21	248.927.988,00	Kecamatan Kesamben
31	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	- 100	336.879.407,00	- 87	45.907.500,00	- 95	35.064.000,00	- 25	0,00	- 50	0,00	- 70	8.627.500,00	- 95	17.748.500,00	- 95	26.376.000,00	- 95,00	75,22	- 95	72.283.500,00	- 95,00	95,00	72.283.500,00	Kecamatan Kesamben
32	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- umlah Koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan Persentase Desa/Kelurahan dengan desa peringkat IKM terbaik	- 12	171.192.022,00	- 12	25.777.500,00	- 12	17.998.000,00		0,00		0,00		3.907.500,00	- 12	14.028.000,00	- 12	17.935.500,00	- 100,00	99,65	- 12	43.713.000,00	- 100,00	25,53	43.713.000,00	Kecamatan Kesamben
33	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- 10	102.708.486,00	- 4	11.165.000,00	- 2	7.910.000,00		0,00		0,00	- 1	3.907.500,00	- 1	3.953.000,00	- 2	7.860.500,00	- 60,00	99,37	- 6	19.025.500,00	- 60,00	18,52	19.025.500,00	Kecamatan Kesamben
34	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- 95%	68.483.536,00	- 90	14.612.500,00	- 95	10.088.000,00		0,00		0,00		0,00	- 10	10.075.000,00	- 10	10.075.000,00	- 105,26	99,87	- 100	24.687.500,00	- 105,26	36,05	24.687.500,00	Kecamatan Kesamben
35	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Jumlah layanan yang dilaksanakan	- 16	100.990.478,00	- 10	11.495.000,00	- 4	8.466.000,00		0,00		0,00		4.720.000,00	- 4	3.720.500,00	- 4	8.440.500,00	- 87,50	99,70	- 14	19.935.500,00	- 87,50	19,74	19.935.500,00	Kecamatan Kesamben
36	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- 20	100.990.478,00	- 7	11.495.000,00	- 4	8.466.000,00		0,00		0,00	- 2	4.720.000,00		3.720.500,00	- 2	8.440.500,00	- 45,00	99,70	- 9	19.935.500,00	- 45,00	19,74	19.935.500,00	Kecamatan Kesamben
37	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		- 39	64.696.907,00	- 29	8.635.000,00	- 10	8.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 0,00	0,00		8.635.000,00	- 0,00	13,35	8.635.000,00	Kecamatan Kesamben
38	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- 250	64.696.907,00	- 90	8.635.000,00	- 50	8.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 36,00	0,00	- 90	8.635.000,00	- 36,00	13,35	8.635.000,00	Kecamatan Kesamben
39	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	- 10	1.323.894.252,00	- 6	20.500.000,00	- 2	28.508.000,00		0,00		10.332.000,00		0,00	- 2	17.072.000,00	- 2	27.404.000,00	- 80,00	96,13	- 8	47.904.000,00	- 80,00	80,00	47.904.000,00	Kecamatan Kesamben
40	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- 12	1.286.394.252,00	- 12	20.500.000,00	- 12	15.788.000,00		0,00		4.500.000,00		0,00	- 12	11.240.000,00	- 12	15.740.000,00	- 100,00	99,70	- 12	36.240.000,00	- 100,00	2,82	36.240.000,00	Kecamatan Kesamben
41	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- 100%	875.025.570,00	- 100	10.500.000,00	- 100	7.700.000,00		0,00	- 100	4.500.000,00		0,00	- 1	3.200.000,00	- 101	7.700.000,00	- 201,00	100,00	- 201	18.200.000,00	- 201,00	2,08	18.200.000,00	Kecamatan Kesamben
42	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- 10	411.368.682,00	- 4	10.000.000,00	- 2	8.088.000,00		0,00		0,00		0,00	- 2	8.040.000,00	- 2	8.040.000,00	- 60,00	99,41	- 6	18.040.000,00	- 60,00	4,39	18.040.000,00	Kecamatan Kesamben
43	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		- 60	37.500.000,00		0,00	- 30	12.720.000,00		0,00		5.832.000,00	- 30	0,00		5.832.000,00	- 30	11.664.000,00	- 50,00	91,70	- 30	11.664.000,00	- 50,00	31,10	11.664.000,00	Kecamatan Kesamben

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
44	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	- Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		37.500.000,00		0,00	- 100	12.720.000,00		0,00	- 50	5.832.000,00		0,00	- 50	5.832.000,00	- 100	11.664.000,00		91,70		11.664.000,00		31,10	11.664.000,00	Kecamatan Kesamben
45	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	- 5	491.567.363,00	- 3	5.740.000,00	- 1	49.315.250,00		0,00		16.950.000,00		12.496.000,00	- 1	19.490.000,00	- 1	48.936.000,00	- 80,00	99,23	- 4	54.676.000,00	- 80,00	80,00	54.676.000,00	Kecamatan Kesamben
46	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	- 10	606.738.463,00	- 6	11.800.000,00	- 2	37.436.900,00		0,00		6.900.000,00		27.684.700,00	- 2	30.988.700,00	- 2	65.573.400,00	- 80,00	175,16	- 8	77.373.400,00	- 80,00	12,75	77.373.400,00	Kecamatan Kesamben
47	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- 20	491.567.363,00	- 4	5.740.000,00	- 4	24.566.900,00		0,00		0,00	- 2	12.496.000,00	- 2	11.700.000,00	- 4	24.196.000,00	- 40,00	98,49	- 8	29.936.000,00	- 40,00	6,09	29.936.000,00	Kecamatan Kesamben
48	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		0,00		0,00	- 2	6.900.000,00		0,00	- 2	6.900.000,00		0,00		0,00	- 2	6.900.000,00		100,00		6.900.000,00			6.900.000,00	Kecamatan Kesamben
49	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		- 37	0,00	- 21	0,00	- 8	17.848.350,00		0,00		10.050.000,00		0,00		7.790.000,00		17.840.000,00	- 0,00	99,95		17.840.000,00	- 0,00		17.840.000,00	Kecamatan Kesamben
50	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	- jumlah koordinasi yang dilaksanakan		0,00		0,00	- 1	17.848.350,00		0,00	- 1	10.050.000,00		0,00	- 1	7.790.000,00	- 2	17.840.000,00		99,95		17.840.000,00			17.840.000,00	Kecamatan Kesamben
51	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	- 5	461.345.021,00	- 3	30.125.000,00	- 1	21.735.250,00		0,00		4.500.000,00		12.540.000,00	- 1	4.600.000,00	- 1	21.640.000,00	- 80,00	99,56	- 4	51.765.000,00	- 80,00	80,00	51.765.000,00	Kecamatan Kesamben
52	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	- 10	461.345.021,00	- 6	30.125.000,00	- 2	21.735.250,00		0,00		4.500.000,00		12.540.000,00	- 2	4.600.000,00	- 2	21.640.000,00	- 80,00	99,56	- 8	51.765.000,00	- 80,00	11,22	51.765.000,00	Kecamatan Kesamben
53	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana	- 5	89.685.551,00	- 1	6.665.000,00	- 2	9.100.000,00		0,00	- 1	4.500.000,00		0,00	- 1	4.600.000,00	- 2	9.100.000,00	- 60,00	100,00	- 3	15.765.000,00	- 60,00	17,58	15.765.000,00	Kecamatan Kesamben
54	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- 5	278.152.887,00	- 1	14.460.000,00	- 1	6.148.350,00		0,00		0,00	- 1	6.100.000,00		0,00	- 1	6.100.000,00	- 40,00	99,21	- 2	20.560.000,00	- 40,00	7,39	20.560.000,00	Kecamatan Kesamben
55	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- 5	93.506.583,00	- 1	9.000.000,00	- 1	6.486.900,00		0,00		0,00	- 1	6.440.000,00		0,00	- 1	6.440.000,00	- 40,00	99,28	- 2	15.440.000,00	- 40,00	16,51	15.440.000,00	Kecamatan Kesamben

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
56	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	- 14	534.407.584,00	- 14	162.677.000,00	- 14	51.088.000,00		6.000.000,00		8.580.000,00		6.000.000,00	- 14	30.500.000,00	- 14	51.080.000,00	- 100,00	99,98	- 14,00	213.757.000,00	- 100,00	100,00	213.757.000,00	Kecamatan Kesamben
57	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Jumlah rekomendasi dan pengawasan yang dilakukan	- 14	602.907.584,00	- 14	168.077.000,00	- 14	58.738.000,00		6.000.000,00		10.155.000,00		6.000.000,00	- 14	30.500.000,00	- 14	52.655.000,00	- 100,00	89,64	- 14	220.732.000,00	- 100,00	36,61	220.732.000,00	Kecamatan Kesamben
58	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- 50	41.812.500,00	- 10	11.637.000,00	- 10	8.588.000,00		0,00		8.580.000,00		0,00		0,00		8.580.000,00	- 20,00	99,91	- 10	20.217.000,00	- 20,00	48,35	20.217.000,00	Kecamatan Kesamben
59	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- 50	57.982.500,00	- 10	13.450.000,00	- 10	6.000.000,00		0,00		0,00	- 10	6.000.000,00		0,00	- 10	6.000.000,00	- 40,00	100,00	- 20	19.450.000,00	- 40,00	33,54	19.450.000,00	Kecamatan Kesamben
60	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- 50	56.503.209,00	- 10	8.325.000,00	- 10	7.500.000,00		0,00		0,00		0,00	- 10	7.500.000,00	- 10	7.500.000,00	- 40,00	100,00	- 20	15.825.000,00	- 40,00	28,01	15.825.000,00	Kecamatan Kesamben
61	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- 10	180.000.000,00		74.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 0,00			74.000.000,00	- 0,00	41,11	74.000.000,00	Kecamatan Kesamben
62	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- 10	139.100.000,00	- 2	44.200.000,00	- 2	6.000.000,00		6.000.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000.000,00	- 20,00	100,00	- 2	50.200.000,00	- 20,00	36,09	50.200.000,00	Kecamatan Kesamben
63	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- 10	59.009.375,00	- 2	11.065.000,00	- 10	6.000.000,00		0,00		0,00		0,00	- 10	6.000.000,00	- 10	6.000.000,00	- 120,00	100,00	- 12	17.065.000,00	- 120,00	28,92	17.065.000,00	Kecamatan Kesamben
64	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		0,00		0,00	- 10	8.000.000,00		0,00		0,00		0,00	- 10	8.000.000,00	- 10	8.000.000,00		100,00		8.000.000,00			8.000.000,00	Kecamatan Kesamben
65	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan		0,00		0,00	- 10	9.000.000,00		0,00		0,00		0,00	- 10	9.000.000,00	- 10	9.000.000,00		100,00		9.000.000,00			9.000.000,00	Kecamatan Kesamben
TOTAL				13.164.498.711,00		7.607.615.500,00		2.191.699.200,00		360.775.223,00		570.039.015,00		411.090.642,00		740.030.794,00		2.081.935.674,00		565,17		9.689.551.174,00		9.689.551.174,00			
Rata-rata Capaian Kinerja Program																							89,17%		29,96%		
Predikat Kinerja Program																							Tinggi		Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																											
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

Blitar, 06 Januari 2025
CAMAT KESAMBEN
HERI WIDYATMOKO, S.Pt
Pembina TK
NIP. 19720115 199803 1 006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kesamben telah menentukan target atas kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2008.

Indikator tujuan dan sasaran yang telah ditentukan targetnya oleh Kecamatan Kesamben pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan indikator pada RKPD Kabupaten Blitar tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, maka di Kecamatan Kesamben dilaksanakan program penunjang dan program wajib sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.019.643.100,-

Indikatornya adalah: Nilai SAKIP Kecamatan yang bernilai 73,35 'BB'

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
- c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- e. Administrasi umum perangkat daerah
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- h. Pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 35.064.000,- Indikatornya adalah: Persentase desa/kelurahan dengan IKM baik

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 28.508.000,- Indikatornya adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp.51.088.000,- Indikatornya adalah: Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang telah dibuat.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
5. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar 49.315.250,-
Indikatornya adalah: Jumlah koordinasi dan fasilitasi Penegakan perda dan Perkada yang dilakukan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 21.735.250,- Indikatornya adalah: Jumlah Koordinasi yang diselenggarakan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Standart nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023 (Th-2)	Tahun 2024 (Th-1)	Tahun 2025 (Th n)	Tahun 2026 (Th+1)	Tahun 2023 (Th-2)	Tahun 2024 (Th-1)	Tahun 2025 (Th n)	Tahun 2026 (Th n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indikator tujuan dan sasaran :											
	Indeks Kepuasan Masyarakat			83	83,5	84	84,5	100%	100%	100%	100%	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			91%	92%	93%	95%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks Kesalehan Sosial			84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)					
	Persentase Penurunan Pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah			B	B	BB	BB	B	B	BB	B	
	Persentase desa mandiri di kecamatan			21%	28%	35%	43%					
	Nilai SAKIP			69,50	70	71	72	60.05	62,20	73,35	72	
	Persentase desa yang memiliki administrasi baik			56%	64%	71%	78%	100%	100%	100%	78%	
	Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik			5	6	7	8	5	6	7	8	

2	Indikator Program dan Kegiatan :											
2.1	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik			90	90	90	100	100	100	100	100	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Layanan yang dilaksanakan			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan			1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2	jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan			1	1	1	1	1	1	1	1	
2.3	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan			3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan			3	3	3	3	3	3	3	3	
2.4	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm			100	100	100	100	100	100	100	100	

	penunjang urusan pemerintahan daerah											
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemeliharaan			100	100	100	100	100	100	100	100	

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai sasaran											
2.5	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
2.6	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat			20	20	20	20	24	20	20	20	
	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan			10	10	10	10	10	10	10	10	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu utama penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan pada 2026 meliputi optimalisasi pelayanan publik yang akuntabel, transformasi digital birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan sinergi pemberdayaan masyarakat. Tantangan ini menuntut kecamatan menjadi pusat layanan dasar yang adaptif, transparan, dan inklusif.

1. Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi

Kecamatan dituntut untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pelayanan masyarakat (digitalisasi birokrasi) guna mempercepat proses administrasi dan memangkas jalur birokrasi. Hal ini juga mencakup penyediaan informasi layanan yang lebih transparan agar mudah diakses oleh masyarakat melalui portal resmi.

2. Evaluasi dan Peningkatan Standar Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan menjadi fokus utama. Pemda terus mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap kecamatan memiliki Standar Pelayanan (SP) yang jelas dan bebas dari pungutan liar, guna menjamin kepuasan masyarakat.

3. Sinergi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pembangunan

Peran kecamatan sangat krusial dalam menjaga kondusivitas wilayah serta berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan/desa. Koordinasi lintas sektoral ini penting untuk mendukung program prioritas daerah, seperti digitalisasi desa dan peningkatan partisipasi warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

4. Optimalisasi Peran Kecamatan sebagai Pusat Layanan

Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, kecamatan berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, isu terkait penyederhanaan layanan administrasi—seperti kependudukan dan perizinan dasar—serta pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota ke tingkat kecamatan terus didorong agar lebih efektif dan efisien.

2.4. Review Terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. Program prioritas pembangunan daerah; dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public
7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Disamping mengacu pada RPJMN Nasional, Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 juga memperhatikan Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan Tahap I (2025–2029) dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045 serta arah kebijakan umum Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 serta prioritas pembangunan

Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 turut menjadi acuan penting dalam merumuskan prioritas pembangunan pada tahun 2026, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka tema dan prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2026 adalah “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif”.

Untuk menunjang tercapainya kebijakan pembangunan pada tahun 2026, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Hilirisasi Pertanian;
3. Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan UMKM dan Industri, serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pengembangan Ekonomi;
4. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif; dan
5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik.

Maka Isu-isu Strategis dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan serta Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas.
2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan.
3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi.
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.
7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan isu strategis Kabupaten Blitar dan isu strategis Kecamatan Kesamben, serta disesuaikan dengan target kinerja Tahun 2026, maka dilakukan analisa kebutuhan. Sehingga dari Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kesamben dilakukan analisa secara mendalam sehingga diperoleh Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 dengan Hasil Analisa Kebutuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Blitar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KESAMBEN						2.747.907.400,00							1.269.966.239,80	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.747.907.400,00							1.269.966.239,80	
	7.01	KECAMATAN						2.747.907.400,00							1.269.966.239,80	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.106.267.640,00						-	499.467.505,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.559.141,00			-	PP5: PENI NGKATAN KETENTR AMAN, KE TERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANA N PUBLIK	-	-	7.744.900,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	6.859.141,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENI NGKATAN KETENTR AMAN, KE TERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANA N PUBLIK	-		7.744.900,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.828.011.950,00			-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-	-	200.286.600,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.784.014.200,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-		196.241.900,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	39.060.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	1.260.750,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			-				-	3.677.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			4.044.700,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.307.500,00			-	-	-	-		4.738.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4.307.500,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.738.250,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			0				0 0	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	39.860.649,00			-	-	-	-	43.216.305,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.575.938,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.733.532,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.258.938,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.584.382,00	KECAMATAN KESAMBEN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.553.957,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.909.393,00	KECAMATAN KESAMBEN	

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.934.316,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.297.748,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	1.537.500,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.691.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.500.000,00			-	-	-	-	44.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.500.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.740.000,00			-	-	-	-	93.514.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	46.740.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.414.000,00	KECAMATAN KESAMBEN

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	76.288.400,00			-	-	-	-	83.917.450,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	41.922.500,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.114.750,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.365.900,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.702.700,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	31.000.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.100.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	71.583.500,00						-	78.741.850,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	36.166.920,00			-	-	-	-	39.783.612,00	KECAMATAN KESAMBEN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	21.596.590,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.756.249,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	14.570.330,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.027.363,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	21.768.607,00			-	-	-	-	23.945.468,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	21.768.607,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.945.468,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	13.647.973,00			-	-	-	-	15.012.770,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	13.647.973,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.012.770,00	KECAMATAN KESAMBEN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	169.247.497,00						-	186.176.932,30	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	154.247.497,00			-	-	-	-	169.676.932,30	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			0				0 0	54.320.694,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		59.757.449,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				10 Dokumen	99.926.803,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109.919.483,30	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KESAMBEN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga K emasyarakat an	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			0				0 0	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	186.117.100,00						-	204.728.810,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	150.242.100,00			-	-	-	-	165.266.310,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	121.695.850,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.865.435,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	28.546.250,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.400.875,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	35.875.000,00			-	-	-	-	39.462.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	35.875.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.462.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	100.158.063,00						-	110.173.870,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	100.158.063,00			-	-	-	-	110.173.870,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	20.707.250,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.777.975,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	57.492.750,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.242.025,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	21.958.063,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.153.870,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	114.533.600,00						-	190.677.272,50	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	114.533.600,00			-	-	-	-	190.677.272,50	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	7.597.500,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.357.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	7.684.246,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			8.452.670,60	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	8.712.500,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			9.583.750,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	16.373.045,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			18.010.349,50	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10 Dokumen	7.156.934,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			7.872.627,40	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	39.975.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			43.972.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	6.534.375,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			71.878.125,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	6.406.250,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			7.046.875,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	7.687.500,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.456.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	6.406.250,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.046.875,00	KECAMATAN KESAMBEN
JUMLAH							2.747.907.400,00							1.269.966.239,80	

2.5 Penelahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memadu serasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut adalah usulan Program dan kegiatan yang disetujui pada Musrenbang tahun 2025

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan

Kecamatan : Kesamben
Tanggal : 20 Februari 2025
Tempat : Aula Kecamatan Kesamben

PP1: PEMERATAAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN & PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
1	PP1	2044165	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Ruas jalan Kabupaten yang menghubungkan Desa Tapakrejo dengan Desa Bumirejo yang kondisi jalannya rusak. Lokasi Berada di Wilayah Dusun Sumbermangku RT.02 RW.02. SK Jln.Kab.No.469 (Sumbermangku - Sumberkunci) Panjang 1,170 km dan SK Jln.Kab.No.470 (Sumberkunci - Sukorejo) Panjang 1,730 km	Dusun Sumbermangku RT.02 RW.02. Desa Tapakrejo. Kecamatan Kesamben, Kab. Blitar	Kesamben	Tapakrejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	PP1	2015665	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kondisi jalan rusak berlubang berbahaya bagi pengendara motor atau pengguna jalan lain nya	DusunSanggrahan RT.01 RW.02 SampaiDusun Jugo RT.01 RW.01 Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	PP1	1942431	Rehabilitasi Jembatan	1. jembatan sudah ambrol tergerus aliran air per desember 2024 2. merupakan jalur penghubung 2 desa 3. merupakan jalur alternatif menuju binangun dari arah timur, jika ada kemacetan di wilayah desa kesamben (jalur wlingi karangkates) 4. akses menuju pusat perekonomian dan pendidikan dari desa pagergunung ke desa kesamben 5. keluhan warga dusun tambak yang di sampaikan melalui surat kepada Kepala Desa Kesamben, jika harus melalui jalur utama memutar jauh.dan memakan waktu yang lama	Dusun Kesamben RT 02 RW 08 Desa Kesamben, Kab. Blitar	Kesamben	Kesamben	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
4	PP1	1942443	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan merupakan penghubung antar desa Pagerwojo dan Tepas sekaligus penghubung antar Kecamatan yaitu Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Doko, pada kondisi saat ini kondisi sudah rusak dan perlu ada pengaspalan HOTMIX	Dsn Rembang, Kab. Blitar	Kesamben	Tepas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	PP1	1980165	Peningkatan SPAM (tandon/pipanisasi)	Kurang Maksimal nya jaringan air bersih	Ds. Bumirejo, Kab. Blitar	Kesamben	Bumirejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PP2: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN & PENGEMBANGAN HILIRISASI PERTANIAN								
1	PP2	2025409	Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi	KURANG PEMAHAMANNYA WARGA DALAM PEMELIHARAAN IKAN LAIK KONSUMSI	KANTOR DESA KEMIRIGEDE RT.003 RW.001, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	PP2	2073447	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Disaat musim penghujan air sering tersumbat oleh tumbuhan yang tumbuh di dalam saluran irigasi dan di saat musim kemarau air tidak sampai ke hillr atau kebagian ujung dikarenakan banyak yang bocor ke samping saluran irigasi.	Dusun Sembung RT.02 RW.06 Saluran Jirak Kerep, Kab. Blitar	Kesamben	Pagergunung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	PP2	2073481	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Disaat musim penghujan air sering tersumbat oleh tumbuhan yang tumbuh di dalam saluran irigasi dan di saat musim kemarau air tidak sampai ke hillr atau ke bagian ujung dikarenakan banyak yang bocor ke samping saluran irigasi.	Dusun Pehlumbu RT.01 RW.01, Saluran Arah Jugo, Kab. Blitar	Kesamben	Pagergunung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN INDUSTRI & UMKM, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI								
1	PP3	2021669	Bintek SDM Pariwisata	Kurangnya SDM yang memadahi	KANTOR DESA KEMIRIGEDE, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	PP3	2078175	Bintek Ekonomi Kreatif	perlu peningkatan sumber daya manusia terkait potensi pariwisata di Desa Jugo Yang perlu di kembangkan	Desa Jugo kesamben Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	PP3	2026396	Pelatihan Digital Marketing	KURANGNYA PEMAHAMAN PELAKU USAHA DALAM DUNIA DIGITAL UNTUK PEMASARAN PRODUKNYA	KANTOR DESA KEMIRIGEDE RT.003 RW.001, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PP4: PEMBANGUNAN SDM YANG INKLUSIF & PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF								
1	PP4	1882636	Pengadaan mebelair r Sekolah untuk lembaga jenjang SD	Meja kursi untuk proses belajar sudah tidak layak serta perlunya matras sebagai alat bantu kegiatan olahraga. Lokasi ada di UPT SDN Pagerwojo 1	Dusun Krajan RT 018 RW 005 Desa Pagerwojo, Kab. Blitar	Kesamben	Pagerwojo	Dinas Pendidikan
2	PP4	2020471	Pembangunan Perpustakaan Sekolah untuk lembaga jenjang SD	BELUM ADANYA SARANA PERPUS YANG MEMADAI	DS. KEMIRIGEDE RT.002 RW.001 KEC. KESAMBEN, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Pendidikan
3	PP4	2068181	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembangunan Pagar, Toilet Kamar Mandi, Prasarana Utilitas Sekolah)untuk lembaga jenjang SD	Toilet kamar mandi siswa sudah tidak layak di gunakan perlu perbaikan	SDN JUGO V (Lima) Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Pendidikan
4	PP4	2023904	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah untuk lembaga jenjang SD	"banyaknya bangunan kelas yang rusak, atapnya sudah lepas - lepas dan atap nya juga bergelombang jadi dikhawatirkan akan membahayakan siswa - siswi yang belajar d ruang kelas tersebut. Lokasi : SDN Sukoanyar 02 Dsn. Sukoanyar Rt 02 Rw 01 Volume : 1 Unit Est. Biaya : Rp. 200.000.000,-"	Dsn. Sukoanyar Rt 02 Rw 01, Kab. Blitar	Kesamben	Sukoanyar	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
5	PP4	1940803	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	Ruang kelas yang ada saat ini numpang di balai dusun dan tidak memenuhi syarat dikarenakan murid banyak ruangan sempit.	Dusun Pagergunung Rt 01 Rw 01, Kab. Blitar	Kesamben	Pagergunung	Dinas Pendidikan
PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK								
1	PP5	2000877	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Ketidaktertiban data aset desa,kurangnya transparansi,kesulitan dalam perencanaan pembangunan,perebutan aset (prioritas 1, P5)	Dusun Krajan RT 011 RW 003 Desa Pagerwojo, Kab. Blitar	Kesamben	Pagerwojo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	PP5	2026205	Peningkatan kapasitas BPD	KURANGNYA SDM BPD	KANTOR DESA KEMIRIGEDE RT.003 RW.001, Kab. Blitar	Kesamben	Kemirigede	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PENA INTAN								
1	PENA INTAN	2080943	Bantuan Sosial Alat Bantu Kruk (PENA INTAN)	Penyandang disabilitas termasuk keluargampras sejahtera sehingga tidak mampu membeli alat bantu jalan (kruk)	Desa Jugo Kesamben Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Sosial
2	PENA INTAN	2086036	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan (PENA INTAN)	banyaknya warga masyarakat Desa Sukoanyar yang belum mengetahui bagaimana prosedur pelaporan kekerasan seksual pada perempuan. Dan kurangnya pengetahuan warga mengenai kekerasan seksual pada perempuan.	Dsn. Sukoanyar Rt 02 Rw 01, Kab. Blitar	Kesamben	Sukoanyar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA	OPD TUJUAN AWAL
3	PENA INTAN	2078128	Bantuan Sosial Alat Bantu Alat Bantu Dengar (PENA INTAN)	Warga mengalami gangguan pendengaran dan tidak bisa mendengar	Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Kab. Blitar	Kesamben	Jugo	Dinas Sosial

Kesamben, 20 Februari 2025



CAMAT KESAMBEN

HERI WIDYATMOKO, S.Pt

Pembina Tk I

NIP. 1972 0115 199803 1006

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2026 berfokus pada agenda ekonomi berdikari, penghematan anggaran besar-besaran (efisiensi), dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berikut adalah telaah komprehensif terhadap pilar-pilar utama strategi nasional tersebut:

1. Fondasi Ekonomi Berdikari & Hilirisasi

Pemerintah secara agresif mendorong kemandirian nasional melalui hilirisasi dan produksi dalam negeri. Kebijakan ini menargetkan agar Indonesia mampu memproduksi kebutuhan utamanya secara mandiri (seperti mobil, motor, dan teknologi)

- Penciptaan Lapangan Kerja:

Mengandalkan realisasi investasi serta memperkuat Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih guna menyerap tenaga kerja formal

- Capaian Makro

2. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial

- Makan Bergizi Gratis (MBG):

Program prioritas yang kini menyasar jutaan penerima, didanai dari hasil realokasi penghematan anggaran negara

- Fokus pada Rentan:

Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan reformasi struktural guna menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan

3. Ketahanan Pangan dan Energi

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat menitikberatkan pada kemandirian dan kedaulatan pangan, utamanya swasembada beras. Pemerintah menargetkan untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara guna menjamin kestabilan pasokan dalam negeri

4. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan secara tegas untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan

Bahwa Kesejahteraan Rakyat, Reformasi, dan Perdamaian sebagai Pilar Masa Depan Indonesia. Diterjemahkan melalui kebijakan efisiensi anggaran secara ketat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahun kedepan maka Kecamatan Kesamben harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Kabupaten Blitar untuk tahun 2025-2029 adalah : “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor penggerak, fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Misi ini berfungsi untuk menggambarkan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Proses perumusan misi bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mencakup tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan langkah strategis yang relevan. Dalam penyusunannya, faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dianalisis secara mendalam, termasuk melalui evaluasi kekuatan, kelemahan,

peluang, dan tantangan yang ada. Dengan adanya rumusan misi ini, arah pembangunan Kabupaten Blitar menjadi lebih jelas dan terarah dalam mendukung realisasi visi yang telah ditetapkan.

Adapun misi Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat;
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan Kesamben melaksanakan misi ketiga yaitu “Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Kesamben dalam kurun tahun 2026 menetapkan tujuan **“Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”** dengan indicator tujuan “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat” yang diperoleh dari Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi esukma Jatim Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan.

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing).

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2026 menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan;
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Indikator tujuan dan sasaran OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkatnya kemandirian desa, OPD Kecamatan Kesamben menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Fokus utamanya adalah mendorong kapasitas tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan ekonomi lokal.

Langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- **Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan:** Mendampingi pemerintah desa dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) agar selaras dengan peraturan di atasnya serta menertibkan administrasi tata pemerintahan desa;
- **Pengawasan Pengelolaan Keuangan:** Membimbing dan mengawasi penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) agar akuntabel, transparan, dan tepat sasaran;
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Mengoordinasikan program peningkatan kapasitas masyarakat desa, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

- **Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana:** Mengoordinasikan perencanaan dan evaluasi pembangunan fisik agar infrastruktur desa benar-benar mendukung aksesibilitas dan perekonomian warga.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, Kecamatan Kesamben melakukan langkah sbb

- **Melakukan Koordinasi Lintas Sektor**
Membangun kerja sama operasional dengan TNI, Polri (Babinsa/Bhabinkamtibmas), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Satpol PP untuk menjaga keamanan wilayah;
- **Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat**
Mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga ketertiban lingkungan;
- **Pengawasan dan Penegakan Aturan**
Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta peraturan kepala daerah di tingkat wilayah;
- **Deteksi Dini dan Penanganan Konflik**
Memetakan wilayah rawan gangguan, memfasilitasi penyelesaian sengketa antarwarga, serta merespons cepat pengaduan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP), OPD Kecamatan Kesamben melakukan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- **Penyusunan Perencanaan yang Selaras:** Menetapkan sasaran strategis dan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, realistis, serta mendukung langsung target kinerja kabupaten/kota.
- **Pengukuran dan Pemantauan Berkala:**
Melakukan evaluasi rutin terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan target Rencana Strategis (Renstra).
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Membekali aparatur kecamatan dengan kompetensi manajemen kinerja, pengelolaan data yang akurat, serta literasi teknologi agar pelaporan lebih tertib.

- **Pelaporan Akurat dan Tepat Waktu:** Menyusun dan mempertanggungjawabkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara komprehensif, transparan, serta menyertakan rencana tindak lanjut perbaikan untuk masa mendatang.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan kesamben kabupaten Blitar
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2026
1	Meningkatnya Integritas penyelenggara pelayanan Publik		Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	82%
		1. Meningkatkan kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa mandiri di kecamatan	Persentase	80%
		2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas di Kecamatan	Angka	6
		3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	73,40

1.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kesamben merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Blitar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas

tersebut diatas Camat mempunyai fungsi : menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan; menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menyelenggarakan pembinaan wilayah; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; melaksanakan pelayanan publik, menyusun laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kesamben diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kesamben merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.
- Pencapaian SPM
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan

Kesamben diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Pencapaian SDGs Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kesamben diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.
- Pengentasan Kemiskinan;
Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Blitar. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Kesamben. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2026 yang akan datang diarahkan pula untuk

menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Kesamben sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Blitar memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Blitar. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kesamben melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kesamben Tahun 2026 adalah 6 Program dengan 17 Kegiatan.

Program dan indikator program yang ditetapkan oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota indikatornya adalah Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target capaian 92%;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik dengan target capaian 82%;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan target capaian 92%;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya adalah Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan dengan target capaian 90%;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya adalah Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target capaian 92%;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah :
 - Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu
 - Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
 - Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu
 dengan target capaian 80% untuk masing-masing indikator;

Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dengan target capaian 100%;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan target capaian 100%;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian 100%;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan target capaian 100%;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran dengan target capaian 100%;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan tepat waktu dengan target 100%;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik targetnya 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan indikatornya adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan targetnya 4 kali;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan indicator jumlah fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan targetnya 4 jenis;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat indikatornya adalah jumlah fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat target 4 dokumen.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa indikatornya adalah jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 4 kegiatan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator Jumlah keluarga yang mengikuti targetnya 50 Keluarga.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator jumlah fasilitasi dan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 5 kegiatan;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum koordinasi yang diselenggarakan targetnya 4 kegiatan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 10 kali.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kesamben sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kesamben dan melingkupi semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif adalah sebesar : Rp 2.566.007.851,00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Blitar.

3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Kesamben Tahun 2026 ini terdapat beberapa kegiatan yang berbeda dengan Rancangan Awal. Ada kegiatan/sub kegiatan yang tidak didanai pada Rancangan Akhir. Juga terdapat beberapa pagu indikatif pada Kegiatan yang bertambah karena prioritas kebutuhan. Dan terdapat beberapa pagu indikatif pada Kegiatan yang berkurang disesuaikan dengan ketersediaan dana.

4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KESAMBEN KAB. BLITAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KESAMBEN						2.566.007.851,00							1.269.966.239,80	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.566.007.851,00							1.269.966.239,80	
	7.01	KECAMATAN						2.566.007.851,00							1.269.966.239,80	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.892.352.882,00						-	499.467.505,00	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kecamatan Kesamben)]	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100	90	90	92	1.892.352.882,00	-	-	-	-	-	-	499.467.505,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.730.000,00			-	PP5: PENI NGKATAN KETENTR AMAN, KE TERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANA N PUBLIK	-	-	7.744.900,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	4.650.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENI NGKATAN KETENTR AMAN, KE TERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANA N PUBLIK	-		7.744.900,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2.290.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.050.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	2.740.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.451.030.282,00			-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-	-	200.286.600,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.404.205.282,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-		196.241.900,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	43.705.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	1.620.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			-				-	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.044.700,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.940.000,00			-	-	-	-	4.738.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.940.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.738.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	83.720.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			0				0 0	83.720.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	54.658.800,00			-	-	-	-	43.216.305,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.477.900,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.733.532,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.331.500,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.584.382,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.543.400,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.909.393,00	KECAMATAN KESAMBEN

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.086.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.297.748,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	32.370.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	3.850.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.691.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.151.200,00			-	-	-	-	44.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	13.636.200,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23.515.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	142.942.600,00			-	-	-	-	93.514.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.355.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30.738.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.050.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.849.456,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.414.000,00	KECAMATAN KESAMBEN

		-	-	-	-	-	-	1.892.352.882,00	-	-	-	-	-	-	499.467.505,00	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.180.000,00			-	-	-	-	83.917.450,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	73.880.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.114.750,00	KECAMATAN KESAMBEN
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kecamatan Kesamben)]	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100	90	90	92	1.892.352.882,00	-	-	-	-	-	-	499.467.505,00	-
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	7.800.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.702.700,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.500.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.100.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	25.050.000,00						-	78.741.850,00	
		[Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Kesamben)]	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	88	80	80	82	25.050.000,00	-	-	-	-	-	-	78.741.850,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	11.800.000,00			-	-	-	-	39.783.612,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	6.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.756.249,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.027.363,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	6.700.000,00			-	-	-	-	23.945.468,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	6.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.945.468,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	6.550.000,00			-	-	-	-	15.012.770,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	6.550.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.012.770,00	KECAMATAN KESAMBEN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	130.985.000,00						-	186.176.932,30	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kesamben)]	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	98	80	90	92	130.985.000,00	-	-	-	-	-	-	186.176.932,30	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	42.010.000,00			-	-	-	-	169.676.932,30	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			0				0 0	13.260.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		59.757.449,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				10 Dokumen	28.750.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109.919.483,30	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	30.050.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga K emasyarakatat an	30.050.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	58.925.000,00			-	-	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			0				0 0	41.225.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	17.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	43.922.400,00						-	204.728.810,00	
		[Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Kesamben)]	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2	8	7	6	43.922.400,00	-	-	-	-	-	-	204.728.810,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	36.932.400,00			-	-	-	-	165.266.310,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	29.232.400,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.865.435,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	7.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.400.875,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	6.990.000,00			-	-	-	-	39.462.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	6.990.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.462.500,00	KECAMATAN KESAMBEN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	34.790.000,00						-	110.173.870,00	
		[Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kesamben)]	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	90	90	92	34.790.000,00	-	-	-	-	-	-	110.173.870,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	34.790.000,00			-	-	-	-	110.173.870,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	7.900.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.777.975,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	19.000.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.242.025,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	5.190.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.153.870,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				3 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	438.907.569,00						-	190.677.272,50	
		[Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Kesamben)]	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	80	80	85	438.907.569,00	-	-	-	-	-	-	190.677.272,50	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	438.907.569,00			-	-	-	-	190.677.272,50	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				10 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.357.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
		-	-	-	-	-	-	438.907.569,00	-	-	-	-	-	-	190.677.272,50	-
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				10 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.452.670,60	KECAMATAN KESAMBEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Kesamben)]	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	80	80	85	438.907.569,00	-	-	-	-	-	-	190.677.272,50	-
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	6.100.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.583.750,00	KECAMATAN KESAMBEN
		-	-	-	-	-	-	438.907.569,00	-	-	-	-	-	-	190.677.272,50	-
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.010.349,50	KECAMATAN KESAMBEN
		[Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Kesamben)]	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	80	80	85	438.907.569,00	-	-	-	-	-	-	190.677.272,50	-
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10 Dokumen	6.750.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.872.627,40	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	394.057.569,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	6.700.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.972.500,00	KECAMATAN KESAMBEN

	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		71.878.125,00	KECAMATAN KESAMBEN
		-	-	-	-	-	-	438.907.569,00	-	-	-	-	-	-	190.677.272,50	-
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.046.875,00	KECAMATAN KESAMBEN
		[Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Kesamben)]	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	80	80	85	438.907.569,00	-	-	-	-	-	-	190.677.272,50	-
	7.01.06.2.01.0017															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	8.000.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.456.250,00	KECAMATAN KESAMBEN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	4.500.000,00	Kab. Blitar, Kesamben, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.046.875,00	KECAMATAN KESAMBEN
	J U M L A H							2.566.007.851,00							1.269.966.239,80	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mengelola 6 Program, 17 Kegiatan dan 49 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan baru sesuai dengan PMDN nomor 90 tahun 2019. Total pagu anggaran 2026 senilai Rp. **2.566.007.851,00**.

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana
	Kecamatan Kesamben	2.566.007.851,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	2.566.007.851,00
	KECAMATAN	2.566.007.851,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.892.352.88200
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.730.000,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.650.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.290.000,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.050.000,00
1.1.4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	2.740.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.451.030.282,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.404.205.282,00
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.705.000,00
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksaan Akutansi SKPD	1.620.000,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.940.000,00
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.940.000,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.658.800,00
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.477.900,00
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.331.500,00
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.543.400,00
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.086.000,00
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.370.000,00
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.850.000,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.151.200,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana
1.6.1	Pengadaan Mebel	13.936.200,00
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.515.000,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.942.600,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.355.000,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.738.144,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.849.456,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.180.000,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.880.000,00
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.500.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.050.000,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.800.000,00
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.700.000,00
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.100.000,00
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.700.000,00
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.700.000,00
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.550.000,00
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.550.000,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.985.000,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.060.000,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.260.000,00
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28.750.000,00
3.1.3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30.050.000,00
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	58.925.000,00
3.2.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	41.225.000,00
3.2.2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	17.700.000,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.922.400,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.932.400,00
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.232.400,00
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.700.000,00
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.990.000,00
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.990.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.790.000,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.790.000,00
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.900.000,00
5.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.000.000,00
5.1.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.190.000,00
5.1.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.700.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	438.907.569,00
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	438.907.569,00
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.300.000,00
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.100.000,00
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.750.000,00
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	394.057.569,00
6.1.6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.700.000,00
6.1.7	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.500.000,00
6.1.8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.000.000,00
6.1.9	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.500.000,00

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Kesamben adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Kesamben agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Kesamben antara lain :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Peningkatan Pelayanan Publik hingga ke desa
4. Belum tersedia Ruang arsip Vital

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Kesamben masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
2. Perencanaan yang sudah ditetapkan Masih bisa berubah tergantung dari situasi kebutuhan yang ada;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji;
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang kurang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Kesamben, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus

dilakukan oleh Kecamatan Kesamben untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain:

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

Kesamben, 14 Agustus 2025


CAMAT KESAMBEN
HERI WIDYATMOKO, S.Pt.
Pembina Tingkat 1
NIP: 19720115 199803 1 006